



E-ISSN: 2722-8576

E-ISSN: 1978-7014

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
VOLUME 16 NOMOR 1, MARET 2025

KONSEP NUSANTARA DALAM POLITIK EKSPANSI GAJAH MADA: FONDASI GEOPOLITIK INDONESIA MODERN

Putu Dana Yasa

Penyuluhan Agama Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara

Email: putu.dyasa@gmail.com

Abstract

Keywords:

Nusantara; Gajah
Mada; geopolitics.

This research discusses the concept of Nusantara articulated through Gajah Mada's expansionist politics during the Majapahit Kingdom as the initial foundation of modern Indonesian geopolitics. Through the famous Sumpah Palapa, Gajah Mada created a political vision to unify the archipelago under Majapahit control. This vision was not just about territorial expansion, but also reflected a geopolitical awareness that united social, cultural and economic entities into a cohesive political entity. Through a historical approach and literature study, this paper explores how Gajah Mada's spirit of territorial integration through diplomacy, military, and cultural assimilation strategies shaped a geopolitical mindset that has been inherited until today. The results of the discussion show that the Nusantara concept developed by Gajah Mada became the basis of the Archipelago Concept, which is now the main paradigm in Indonesian geopolitics. The awareness of the importance of unity in diversity, the management of the archipelago, as well as the collective spirit to maintain national integration, have strong historical roots from the Majapahit period. Therefore, the political legacy of Gajah Mada's expansion not only has historical significance, but also strategic in the formation of national identity and the management of Indonesia's geopolitics today.

Abstrak

Kata kunci:

Nusantara; Gajah
Mada; geopolitik.

Penelitian ini membahas konsep Nusantara yang diartikulasikan melalui politik ekspansi Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit sebagai fondasi awal dari geopolitik Indonesia modern. Melalui Sumpah Palapa yang terkenal, Gajah Mada mencetuskan visi politik untuk menyatukan wilayah-wilayah kepulauan di Nusantara di bawah kendali Majapahit. Visi ini bukan sekadar ekspansi teritorial, melainkan juga mencerminkan kesadaran geopolitik yang menyatukan entitas-entitas sosial, budaya, dan ekonomi ke dalam satu kesatuan politik yang kohesif. Melalui

pendekatan historis dan studi pustaka, tulisan ini mengeksplorasi bagaimana semangat integrasi wilayah yang dilakukan oleh Gajah Mada melalui strategi diplomasi, militer, dan asimilasi budaya membentuk pola pikir geopolitik yang diwariskan hingga masa kini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konsep Nusantara yang dikembangkan Gajah Mada menjadi dasar dari Wawasan Nusantara yang kini menjadi paradigma utama dalam geopolitik Indonesia. Kesadaran akan pentingnya kesatuan dalam keberagaman, pengelolaan wilayah kepulauan, serta semangat kolektif untuk mempertahankan integrasi nasional, memiliki akar historis yang kuat dari masa Majapahit. Oleh karena itu, warisan politik ekspansi Gajah Mada tidak hanya memiliki makna historis, tetapi juga strategis dalam pembentukan identitas kebangsaan dan pengelolaan geopolitik Indonesia masa kini.

PENDAHULUAN

Politik dan Kepemimpinan merupakan dua hal yang selalu hangat untuk diperbincangkan, sejak zaman kerajaan sampai pada kehidupan post modern saat ini kedua wacana ini selalu menarik untuk didiskusikan. Di tengah berbagai macam perbedaan yang ada di Nusantara tentunya menjadi tanda tanya besar, sistem politik dan pola kepemimpinan seperti apa yang dapat diterima. Agama, suku, adat istiadat, budaya dan masih begitu banyak perbedaan-perbedaan yang tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Indonesia. Perbedaan latar belakang ini tentunya juga akan menciptakan doktrin-doktrin yang membangun karakter masing-masing kelompok dalam menjalankan kehidupan.

Jika melihat jejak historis, tentu Indonesia hingga saat ini telah melewati berbagai proses yang begitu panjang, sehingga mampu tetap kuat dan bertahan di tengah berbagai macam perbedaan yang ada. Meskipun tidak dapat dipungkiri juga bahwa sampai saat ini masih saja muncul orang-orang yang mempermasalahkan setiap perbedaan tersebut dan merasa sebagai orang yang memiliki posisi kebenaran paling absolut sehingga orang lain dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah.

Kesadaran akan takdir keragaman yang ada di Nusantara ini tentunya terbangun melalui berbagai aspek dan salah-satunya adalah aspek politis. Politik menjadi bagian kehidupan manusia bahkan tidak dapat dilepaskan sepanjang kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai umat Hindu konsep-konsep politik begitu banyak disampaikan didalam susastra keagaman, sehingga secara textual aspek politis ini sejatinya telah eksis sejak zaman dahulu. Ketika kita berbicara perihal politik dan bumi nusantara, salah-satu kerjaan yang sangat besar dan selalu dikaitkan dengan istilah Nusantara adalah Kerajaan Majapahit. Salah-satu tokoh yang begitu terkenal dikalangan masyarakat hingga saat ini adalah Mahapatih Gajah Mada dengan spiritnya menyatukan Nusantara.

Nama Patih Gajah Mada tentunya menjadi nama yang begitu populer di Nusantara, Gajah Mada menjadi salah-satu tokoh terhormat dibumi Nusantara, perjuangan dan implementasi nilai-nilai politik dalam menyatukan Nusantara menjadi penting untuk diketahui ditengah kehidupan saat ini. Luasnya bumi nusantara dengan segala dinamika politik yang ada saat itu menjadi salah-satu tantangan Gajah Mada dalam mewujudkan sumpah palapanya. Patih Gajah Mada seolah menjadi simbolisasi kejayaan kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-14. Mahapatih Gajah merupakan seorang tokoh pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Di dalam Kakawin Gajah Mada ditemukan berbagai teknik, strategi, profil pemimpin, dan ajaran kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Mahapatih Gajah Mada yang kiranya masih relevan untuk dikaji dari perspektif model kepemimpinan Hindu dalam masyarakat Bali, tentunya ada pula hal-hal yang negatif yang tidak patut diteladani (Dharma Putra, Anggara Putu, 2010).

Nama besar Patih Gajah Mada tentunya muncul akibat perannya dalam menyatukan luasnya bumi Nusantara yang majemuk. Kerajaan Majapahit yang begitu luas kala itu terbangun ditengah kemajemukan seperti apa yang kita warisi hingga saat ini. Kemajemukan ini tentunya memberikan tantangan yang begitu besar apabila ingin disatukan, ditambah lagi dengan kondisi politik pada zaman kerajaan yang tentunya selalu dibayangi dengan peperangan dan perebutan kekuasaan.

Masyarakat Majapahit umumnya merupakan masyarakat yang majemuk. Wilayah Kerajaan Majapahit yang sangat luas, dengan segala karakteristik wilayahnya, menjadikan Majapahit memiliki keragaman yang ditentukan oleh banyak hal, wilayah di pedalaman yang bersendikan agraris, akan memiliki pola kebudayaan yang berbeda dengan daerah pantai yang bersendikan perdagangan. Masyarakat pedalaman lebih bersifat tertutup dengan kebudayaan siklus (berputar tetap). Sementara masyarakat pantai yang secara geografis sering berhubungan dengan bangsa asing, lebih bersifat terbuka terhadap hal-hal baru. Kehidupan keagamaan Majapahit menunjukkan pula hubungan dengan sendi-sendian toleransi yang kuat. Majapahit mengakui dan menghormati dua agama besar saat itu, yakni Hindu dan Buddha, dalam bentuk pengangkatan pejabat keagamaan dalam struktur pemerintahannya (Pinuluh, Esa Damar, 2010).

Ditengah kemajemukan ini Patih Gajah Mada mampu melakukan gerakan politik sebagai upaya penyatuan Nusantara yang begitu luas dan penuh dengan keragaman ini. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dipahami secara mendalam oleh generasi muda. Semangat pemuda khususnya pemuda Hindu harus mampu semakin membara ketika melihat bagaimana perjuangan para pendahulu dalam menegakan persatuan dibumi pertiwi ini. Didalam tulisan ini penulis berupaya menyajikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada selaku pelaksana tugas kekuasaan Majapahit yang memiliki peranan

penting terhadap keberadaan Nusantara yang dulunya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit.

Sejatinya para pemuda harus memiliki kesadaran kembali mengedepankan spirit-spirit politik yang diterapkan Patih Gajah Mada sebagai upaya menjawab tantangan kehidupan modern dalam memunculkan pemimpin-pemimpin yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Peranan Gajah Mada dalam masa kejayaan kerajaan majapahit yang secara konsisten melakukan perluasan kekuasaan tentu sangat penting sehingga saat ini kita mengenal negara yang kita sebut dengan Indonesia. Sehingga melalui tulisan ini berupaya mengetahui, memahami serta mengimplementasikan spirit-spirit kepemimpinan Patih Gajah Mada yang tentunya dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal menjaga dan merawat keutuhan bangsa dan negara ditengah kondisi kehidupan politik yang kerap kali mempertontonkan hal-hal yang kurang bijaksana. Penelitian ini lebih menekankan pada sebuah pendekatan politik. Studi politik sebagai cabang ilmu sosial mempelajari dinamika kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks sejarah Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menganalisis strategi politik Gajah Mada dalam memperluas kekuasaan Majapahit, yang sering dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya Indonesia modern.

Gajah Mada, melalui Sumpah Palapa yang diucapkannya, menunjukkan tekad kuat untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah panji Kerajaan Majapahit. Strategi yang digunakan tidak hanya melalui ekspedisi militer, tetapi juga diplomasi dan integrasi budaya. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel "Gajah Mada, Patih Agung yang Berperan dalam Menyatukan Nusantara", Gajah Mada membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil dan penguasa lokal, serta mempromosikan budaya dan agama Hindu-Buddha di wilayah-wilayah baru untuk membangun kesetiaan dan persatuan di bawah pemerintahan Majapahit.

Pendekatan geopolitik Gajah Mada ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang pentingnya stabilitas dan integrasi dalam membangun kekuasaan yang berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan dalam artikel "*Gajah Mada's Political Legacy: Exploring Leadership Dynamics in Nusantara*", Gajah Mada tidak hanya fokus pada penaklukan wilayah, tetapi juga pada pembangunan sistem administrasi yang efisien dan hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Dalam perspektif studi politik, strategi Gajah Mada ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang visioner dan integratif dapat menciptakan fondasi bagi terbentuknya entitas politik yang luas dan beragam. Hal ini sejalan dengan konsep geopolitik yang menekankan pentingnya memahami kondisi geografis, budaya, dan sosial dalam merancang kebijakan politik yang efektif.

PEMBAHASAN

1. Memaknai Gelar Gajah Mada

Sejak kecil nama Patih Gajah Mada telah kita dengarkan, kita selalu diberikan gambaran bahwa terdapat seorang Patih yang sangat gagah perkasa dengan sumpah Palapanya ingin menyatukan Nusantara. Patih ini konon mewujudkan sumpah Palapanya pada masa kerajaan Hayam Wuruk, hal ini ditandai dengan begitu luasnya daerah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pengaruh dari patih Gajah Mada dalam mempertahankan kejayaan kerajaan Majapahit sangatlah besar bahkan dikatakan melampaui Hayam Wuruk yang menjadi raja saat itu. Realisasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada mencapai keberhasilannya semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Majapahit pada waktu itu mampu menguasai wilayah Nusantara yang meliputi Melayu (Sumatra), Tanjungpura (Kalimantan), Semenanjung Melayu (Malaka), sebelah Timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Jawa (kecuali Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan). Berkat keberhasilannya ini, pengaruh Gajah Mada di Majapahit lebih besar. Bahkan pengaruhnya bisa dikatakan melampaui Hayam Wuruk dan anggota Saptaprabhu (semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga Kerajaan Majapahit) (Achmad, Sri Wintala, 2016).

Didalam keyakinan Hindu gajah juga selalu diidentikan dengan dewa Ganesa, sosok dewa yang berkepala gajah dan berbadan manusia yang tidak lain adalah putra dari Siva dan Parwati. Dewa Ganesa dipuja sebagai pengusir segala penghalang dan juga dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan. Menurut Agus Ari Munandar (2010:13) jika dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan dengan dua sifat, yaitu *pertama* dia menganggap dirinya sebagai *vahana* Raja, pelaksana perintah-perintah raja, seperti *Gajah Airavata* menjadi wahana dewa Indra. *Kedua* dia diibaratkan seperti orang mabuk dan beringas jikalau menhadapi berbagai rintangan yang akan menghalang kemajuan Kerajaan. Pilihan nama yang tepat bagi diri Gajah Mada dan nampaknya nama itu telah dipikirkan lebih mendalam maknanya sebelum dipakai untuk nama dirinya. Sedangkan dalam perpustakaan (Yamin, 1993: 3) Gajah Mada dikenal juga dengan nama lain, seperti Mpu Mada, Jaya Mada atau Dwirada Mada. Menurut agama, namanya adalah Lembu Muksa, sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Yamin memperkirakan bahwa Gajah Mada atau Madakari itu hanyalah suatu gelar raja; nama kecilnya tidak dikenali.

Selain makna dari sebuah gelar Patih Gajah Mada diatas, kita dapat memahami bahwa Gajah Mada memiliki peranan yang sangat besar dalam penyatuan Nusantara. Keperkasaan Gajah Mada dan spirit sumpah palapa terbukti dengan begitu banyaknya wilayah yang ditaklukan saat itu. Gajah Mada menjadi tokoh yang begitu terkenal bahkan

hingga saat ini, jejak historis telah mencatat perjuangan Gajah Mada mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk.

2. Politik Penyatuan Nusantara

Pergerakan politik dalam penaklukan beberapa wilayah oleh kerajaan Majapahit tentunya telah termuat didalam beberapa catatan sejarah yang kita terima hingga saat ini. Gerakan politik yang dilakukan Gajah Mada dalam panyatuan Nusantara tidak lain adalah manifes dari sumpah palapa yang berbunyi *Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa*. Artinya setelah tunduk Nusantara, aku akan beristirahat. Setelah tunduk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku beristirahat.

Slamet Muljana (2012: 250-251) menilai bahwa program politik Gajah Mada merupakan manifestasi dari sumpah palapa itu pada hakikatnya adalah lanjutan gagasan Nusantara Raja Kertanegara. Akan tetapi ada perbedaan yang sedikit tampak, yaitu program politik semasa Raja Kertanegara karena terjadi peristiwa-peristiwa pemberontakan maka lebih mengutamakan untuk menutup pemberontakan dalam negeri. Berbeda dengan keadaan untuk program politik Gajah Mada yang berusaha untuk menundukan pulau-pulau atau negeri seberang, seperti yang terkadung dalam sumpahnya. Jika diperhatikan dengan teliti, wilayah-wilayah yang menjadi sasaran Gajah Mada dalam sumpahnya tersebut merupakan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukan semasa Raja Kertanegara, akan tetapi akibat keruntuhan kerajaan Singhasari dan kerusuhan dalam negeri selama pemerintahannya wilayah tersbeut telah bebas kembali. Demikianlah terlihat bahwa pada hakikatnya program politik Gajah Mada merupakan lanjutan dari gagasan program politik Raja Kertanegara, walaupun program politik Gajah Mada itu mengandung penyatuan kembali negeri-negeri diseberang lautan yang telah lepas, ditambah dengan negeri Nusantara lainnya. Sehingga program politik Gajah Mada dalam penyatuan Nusantara lebih luas dari program politik Nusantara Raja Kertanegara.

Beberapa catatan sejaran yang memuat pola politik Patih Gajah Mada misalnya yang termuat didalam *Kakawin Nagarakertagama* yang mencatat bagaimana Gajah Mada melakukan gerakan politik untuk menaklukan Bali pada tahun saka 1265. Strategi dan kecerdikan yang dilakukan Gajah Mada berhasil membawa Majapahit mendapatkan kemenangan tanpa banyak korban jiwa yang berjatuhan. *Kakawin Nagarakertagama* pupuh 49/4 menjelaskan tentang bagaimana Majapahit menaklukan Bali.

Muwah ring śakābdheśu māsākṣi nābhi, ikang bāli nāthanya duśśila nicchā, dinoning bala bhrṣṭa sakwēh wināśa, hares salwiring duṣṭa mangdoh wiśāta

Terjemahan:

Tahun *Isumansaksinabi* "saka panah musim mata pusat-1265" (1334 Masehi) pulau Bali yang rajanya berperilaku buruk dan rendah budi, diserang pasukan Majapahit hingga gugur bersama bala tentaranya, yang berniat jahat ketakutan lalu pergi menjauh.

Semasa menundukan Bali, Gajah Mada mempunyai berbagai senis strategi dan kecerdikan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam penundukan Bali tersebut, Gajah Mada menerapkan ajaran Dharma, yaitu perkara menepati janji. Ki Pasung Grigis dikalahkan oleh Gajah Mada saat dipojokan atas ingkar janji dari Ki Pasung Grigis walaupun hanya terhadap anjingnya. Ki Pasung Grigis menjanjikan bahwa anjing tersebut akan diberi makanan, tetapi kenyataannya dia hanya memberi tempurung kelapa. Dalam pandangan para ksatria perbuatan tersebut termasuk pengingkaran janji dan suatu perbuatan yang rendah. Gajah Mada menekankan pada Ki Pasung Grigis bahwa melalui perbuatan itulah maka kesaktiannya akan hilang jika berkelahi. Ki Pasung Grigis sangat terkejut dengan keadaan tersebut, maka ia segera menyatakan takluk terhadap Gajah Mada dan terntara Majapahit memenangi pertempuran tanpa banyak menyebabkan korban.

Berdasarkan dari tafsirannya terhadap *Babad Arya Kutawaringin*, selanjutnya Mundandar (2010:41) menjelaskan selepas kemenangan Gajah Mada menaklukan pulau Bali, Gajah Mada tidak pulang begitu saja ke kerajaan Majapahit dan melanjutkan membagi tugas diantara para ksatria Majapahit untuk berkuasa diwilay tertentu. Selanjutnya ada beberapa yang dilantik menjadi kepala pasukan Majapahit untuk menetap dan memimpin wilayah tertentu, misalnya *Arya Kutawaringin* di Gegel, *Arya Kenceng* di Tabanan, *Arya Belog* di Kaba-Kaba, *Arya Dalancang* di Kapal, *Arya Sentong* di Carangsari, *Arya Kanuruhan Singa Sardula* di Tangkas dan lainnya. Jika melihat tindakan-tindakan Gajah Mada sewaktu menundukan pulau Bali, kita dapat melihat bahwa Patih Gajah Mada selain memiliki kemampuan untuk berperang, juga mahir dalam politik dalam tata pemerintahan. Secara sistematis Gajah Mada menyiapkan struktur pemerintahan pasca kemenangannya menaklukan pulau Bali.

Penaklukan Bali oleh Majapahit pada tahun 1343 Masehi merupakan bagian dari usaha besar Gajah Mada untuk memperluas wilayah dan pengaruh Majapahit di Nusantara. Meskipun Bali ditaklukkan dengan kekuatan militer, pengaruh kebudayaan Majapahit dan Bali tetap berjalan berdampingan, dengan Bali mempertahankan banyak tradisi dan kebudayaan Hindu-Bali yang hingga kini masih ada. Penaklukan ini juga menandai semakin kokohnya kekuasaan Majapahit di wilayah timur Indonesia, sebelum akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran pada abad ke-15.

Selain pulau Bali, pergerakan politik Patih Gajah Mada yang termuat didalam *Kakawin Nagarakertagama* adalah penaklukan Dompo. Nurhayati (2017: 60) menjelaskan meskipun Gajah Mada tidak langsung memimpin penyerangan ke Dompo tersebut, akan tetapi telah membuktikan bahwa pada zamannya, program politik penyatuan Nusantara telah dilaksanakan ditempat itu. Penaklukan Dompo dilakukan oleh utusan yang diketuai oleh Mpu Nala. Gelar yang dipakai oleh Mpu Nala sebagai *tumenggung* dan dia juga seorang senapati tentara dalam peperangan dengan negeri-negeri lain.

Penaklukan Dompo oleh Gajah Mada adalah salah satu bagian dari ekspansi besar Majapahit di bawah kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada, yang bertekad menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu kekuasaan. Dompo adalah wilayah yang terletak di bagian barat pulau Sumbawa, yang pada saat itu merupakan sebuah kerajaan kecil yang merdeka. Penaklukan Dompo oleh Majapahit terjadi sekitar awal abad ke-14, sekitar tahun 1330-an, ketika Gajah Mada sedang gencar melakukan ekspansi politik dan militer. Dompo, pada masa itu, merupakan sebuah kerajaan yang relatif kecil di wilayah timur Nusantara. Wilayah ini berada di pulau Sumbawa yang termasuk dalam bagian kerajaan-kerajaan yang ada di timur Nusantara, yang sering terlibat dalam persaingan dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Singhasari dan Majapahit. Penaklukan Dompo kemungkinan besar dipicu oleh ambisi Gajah Mada untuk memperluas pengaruh Majapahit di wilayah timur. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan kecil di Sumbawa, termasuk Dompo, sering kali berada di luar kendali Majapahit, dan dengan menaklukkan Dompo, Majapahit bisa menguasai jalur perdagangan penting di wilayah tersebut. Selain itu, Dompo mungkin terlibat dalam hubungan diplomatik atau politik yang tidak menguntungkan bagi Majapahit, atau bisa jadi merupakan bagian dari wilayah yang tidak sepenuhnya tunduk pada Majapahit. Oleh karena itu, Gajah Mada memutuskan untuk menaklukkan wilayah tersebut.

Selain penaklukan Bali dan Dompo tentu masih begitu banyak jejak-jejak historis dari manifestasi sumpah palama Patih Gajah Mada, misalnya ketika kita melihat catatan sejarah melayu yang mencatat kejayaan bala tentara Majapahit yang mampu menaklukan wilayah diluar Jawa. Menurut catatan sejarah melayu tersebut dipaparkan tentara Majapahit berjaya menaklukan satu diantara daerah Nusantara yang harus ditaklukan dalam sumpah palapa gajah Mada yaitu Tumasik (seperti yang dicatat pada daftar negara taklukan Majapahit dalam *Kakawin Negarakertagama* pupuh 13). Kejayaan Majapahit menaklukan Tumasik tidak lain karena terjadinya penghianatan oleh penguasa Tumasik yang bernama Rajuna Tapa. Majapahit bisa mendapatkan keterangan kelemahan-kelemahan Tumasik dari Rajuna Tapa. Setelah perang dan Tumasik mengakui kekuasaan Majapahit, selanjutnya Rajuna Tapa memperoleh kutukan dari negeri sebagai jawaban penghianatan.

3. Strategi Politik dan Geopolitik Gajah Mada

Dalam konteks perluasan wilayah dan kekuasaan, strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan integrasi politik suatu kerajaan yang luas dan majemuk seperti Majapahit. Gajah Mada, sebagai Mahapatih yang paling berpengaruh, menerapkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memadukan diplomasi dan pemahaman geopolitik yang matang. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menyatukan berbagai kerajaan dan wilayah yang tersebar di Nusantara. Keseriusan dan tekad Gajah Mada dalam menjalankan strategi politiknya dapat dilihat melalui sumpah yang ia ucapkan, yang menegaskan bahwa penyatuan Nusantara bukan sekadar ambisi kekuasaan, melainkan sebuah visi untuk menciptakan kesatuan politik yang kokoh dan berkelanjutan.

Gajah Mada, sebagai Mahapatih Majapahit pada abad ke-14, dikenal luas karena strategi politik dan geopolitiknya yang ambisius dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Salah satu wujud nyata dari strategi tersebut adalah Sumpah Palapa yang terkenal, dimana Gajah Mada bersumpah untuk tidak menikmati palapa (kenikmatan duniawi) sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit (Pigeaud, 1960). Perluasan kekuasaan Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Gajah Mada merupakan salah satu contoh paling penting dalam sejarah Nusantara tentang bagaimana kekuasaan politik dapat dibangun melalui perpaduan antara kekuatan militer, diplomasi, dan pengelolaan geopolitik. Wilayah Majapahit yang sangat luas dan beragam secara geografis dan budaya menuntut adanya strategi yang tidak hanya bersifat penaklukan fisik, tetapi juga integrasi sosial dan politik. Dalam konteks ini, Gajah Mada menampilkan visi yang jauh ke depan dengan menyadari bahwa penyatuan Nusantara membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur.

Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada menjadi simbol kuat dari tekad dan komitmennya untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah panji Majapahit. Namun, perjuangan Gajah Mada bukan hanya soal ekspansi wilayah melalui peperangan, melainkan juga melalui diplomasi dan pembangunan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan lain. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman mendalam Gajah Mada terhadap dinamika politik dan kondisi geografis Nusantara yang kompleks. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. I Ketut Riana, strategi politik yang diterapkan oleh Gajah Mada melibatkan perpaduan antara kekuatan militer dan diplomasi budaya yang efektif dalam mengkokohkan kekuasaan Majapahit di berbagai wilayah.

Strategi politik Gajah Mada tidak hanya bersandar pada kekuatan militer semata, melainkan juga melibatkan diplomasi cerdas dan integrasi budaya. Ia membangun hubungan aliansi dengan berbagai kerajaan di wilayah Nusantara, menggabungkan unsur

politik, ekonomi, dan agama untuk memperkuat kekuasaan pusat Majapahit. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang pentingnya konsolidasi sosial dan budaya dalam penguatan kekuasaan politik (Riana, 2009). Secara geopolitik, Gajah Mada memanfaatkan posisi strategis Majapahit yang terletak di jalur perdagangan maritim penting di Asia Tenggara. Penguasaan jalur laut tersebut memungkinkan Majapahit mengontrol perdagangan dan hubungan diplomatik antar kerajaan di wilayah Nusantara, yang kemudian menjadi modal penting dalam memperluas pengaruh politiknya (Wolters, 1999).

Strategi politik dan geopolitik Gajah Mada dalam memperluas kekuasaan Majapahit menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang visioner dan adaptif terhadap kompleksitas wilayah Nusantara. Dengan memahami karakteristik geografis dan sosial budaya yang beragam, Gajah Mada tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memperkuat jaringan aliansi politik serta membangun hubungan diplomatik yang berkelanjutan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pendekatan ini berhasil menciptakan sebuah sistem kekuasaan yang terintegrasi dan relatif stabil di wilayah yang sangat luas dan majemuk.

Lebih jauh, pengelolaan kekuasaan yang dilakukan Gajah Mada menjadi cikal bakal terbentuknya kesadaran politik kolektif yang dapat dikatakan sebagai embrio dari negara kesatuan Indonesia. Melalui penyatuan wilayah dan penguatan legitimasi politik Majapahit, gagasan tentang Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah yang bersatu mulai terbentuk. Konsep ini kemudian berkembang menjadi dasar historis dan ideologis bagi pembentukan negara Indonesia modern, yang juga merupakan negara kepulauan dengan keberagaman budaya, suku, dan agama.

Dengan demikian, kajian terhadap strategi politik dan geopolitik Gajah Mada bukan hanya penting dalam konteks sejarah kerajaan Majapahit, tetapi juga relevan dalam studi politik modern, khususnya dalam memahami dinamika pembentukan dan pemeliharaan kesatuan nasional Indonesia saat ini. Warisan kepemimpinan Gajah Mada memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya visi, diplomasi, dan adaptasi terhadap kondisi geopolitik dalam membangun negara yang kokoh, majemuk, dan berdaulat, yang menjadi fondasi keberadaan Indonesia saat ini.

4. Peran Geopolitik dalam Konsolidasi Wilayah Nusantara

Geopolitik memainkan peranan yang sangat strategis dalam konsolidasi wilayah Nusantara pada masa Majapahit, terutama di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Wilayah Nusantara yang terdiri atas ribuan pulau dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari pegunungan, hutan lebat, hingga jalur laut yang vital, menuntut pendekatan

politik yang memahami dan memanfaatkan posisi geografis secara optimal. Penguasaan jalur-jalur perdagangan laut dan daerah strategis menjadi kunci dalam memperkuat dominasi Majapahit, mengingat letak Nusantara yang menjadi persimpangan antara benua Asia dan Australia serta jalur perdagangan antara India dan China.

Dalam konteks ini, Gajah Mada dan para pemimpin Majapahit menggunakan strategi geopolitik untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah yang tersebar secara fisik dengan mengontrol pusat-pusat perdagangan dan pelabuhan penting. Dengan menguasai titik-titik strategis tersebut, Majapahit mampu mengendalikan arus perdagangan, informasi, serta mobilitas politik dan militer yang menjadi fondasi kekuasaannya. Pendekatan ini juga memungkinkan Majapahit untuk menjalin hubungan diplomatik dan aliansi yang saling menguntungkan dengan kerajaan-kerajaan pesisir dan kerajaan maritim di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, pendekatan geopolitik ini membantu Majapahit dalam menghadapi ancaman dari kekuatan luar maupun internal. Pengelolaan wilayah yang berorientasi pada posisi geografis juga memperkuat kesatuan politik dengan mengoptimalkan komunikasi dan mobilisasi sumber daya di berbagai wilayah. Dengan demikian, konsolidasi wilayah Nusantara bukan hanya merupakan hasil dari penaklukan militer, tetapi juga produk dari strategi geopolitik yang matang yang menggabungkan aspek geografis, ekonomi, dan diplomasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pengelolaan geopolitik yang adaptif memungkinkan Majapahit untuk menghadapi tantangan internal maupun eksternal, seperti konflik antar kerajaan dan ancaman dari kekuatan asing. Coedes (1968) menekankan bahwa pendekatan geopolitik Majapahit tidak hanya meliputi aspek militer, tetapi juga pengelolaan hubungan diplomatik dan budaya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan wilayah. Dengan demikian, konsolidasi wilayah Nusantara pada masa Majapahit merupakan hasil perpaduan strategi militer, ekonomi, dan diplomasi yang berlandaskan pada pemahaman geopolitik yang mendalam terhadap kondisi geografis dan sosial budaya kawasan tersebut. Peran geopolitik dalam konsolidasi wilayah Nusantara pada masa Majapahit, khususnya melalui kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh Gajah Mada, merupakan fondasi penting dalam pembentukan kesatuan wilayah yang luas dan beragam. Penguasaan jalur perdagangan strategis dan pelabuhan utama di Nusantara tidak hanya memperkuat dominasi Majapahit, tetapi juga membangun jaringan politik dan diplomasi yang kokoh dengan berbagai kerajaan di kawasan tersebut. Strategi geopolitik ini memperlihatkan kepemimpinan visioner Gajah Mada yang mampu mengintegrasikan aspek militer, ekonomi, dan diplomasi guna menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif.

Sejalan dengan pandangan dalam *Perluasan Kekuasaan Geopolitik Gajah Mada sebagai Cikal Bakal Indonesia*, tindakan politik dan geopolitik Gajah Mada dapat dipandang sebagai tonggak awal terbentuknya konsep Nusantara sebagai kesatuan politik. Perluasan kekuasaan dan konsolidasi wilayah di bawah Majapahit bukan sekadar ekspansi kerajaan, melainkan merupakan cikal bakal dari ide negara kesatuan Indonesia yang saat ini berdiri. Dengan demikian, kajian terhadap geopolitik Majapahit dan peran Gajah Mada memberi pemahaman penting tentang bagaimana warisan politik masa lampau menjadi dasar historis dan ideologis pembentukan Indonesia modern.

5. Implikasi Perluasan Kekuasaan Gajah Mada terhadap Keberadaan Indonesia

Saat Ini

Pembahasan mengenai cikal bakal Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan sejarah panjang Nusantara, khususnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Dalam narasi sejarah Indonesia, Majapahit sering dianggap sebagai kerajaan yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara di bawah satu kekuasaan politik yang terorganisir. Di balik keberhasilan itu, sosok Mahapatih Gajah Mada muncul sebagai tokoh sentral yang memainkan peran penting dalam upaya konsolidasi wilayah melalui pendekatan politik dan geopolitik yang strategis.

Gajah Mada tidak hanya dikenal melalui Sumpah Palapa yang ikonik, tetapi juga melalui tindakannya yang konkret dalam memperluas pengaruh Majapahit ke berbagai penjuru Nusantara. Dalam konteks ini, ekspansi Majapahit bukan sekadar perluasan teritorial, melainkan juga proses pembentukan ruang politik yang mempertemukan beragam etnis, budaya, dan agama dalam satu struktur kekuasaan yang relatif stabil. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pemahaman mendalam terhadap dinamika geografis dan sosial yang menjadi dasar penting dalam pembentukan identitas politik bersama. Dalam kerangka negara-bangsa modern, apa yang dilakukan Gajah Mada sesungguhnya merupakan bentuk awal dari pembangunan konsep kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*). Dengan menjalin relasi politik dan diplomatik antar wilayah, serta mengelola keberagaman dengan prinsip toleransi dan stabilitas, Majapahit memberikan warisan ideologis dan praktis bagi pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Hal inilah yang menjadikan perluasan kekuasaan geopolitik Gajah Mada relevan untuk ditelaah sebagai salah satu fondasi historis dari keberadaan Indonesia saat ini.

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi mencerminkan tekad untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah panji Majapahit. Melalui kombinasi strategi militer dan diplomasi, Gajah Mada berhasil mengintegrasikan berbagai kerajaan di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, seperti

Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap pentingnya kesatuan dalam keberagaman, yang menjadi ciri khas Indonesia modern. Konsep "Nusantara" yang diusung oleh Gajah Mada kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam bentuk Wawasan Nusantara, yang menjadi pandangan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya kesatuan wilayah dan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Hal ini sejalan dengan semangat yang ditunjukkan oleh Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara, yang hingga kini menjadi landasan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, konsep Nusantara dalam politik ekspansi Gajah Mada telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk fondasi geopolitik Indonesia modern. Semangat persatuan dan integrasi yang diusung oleh Gajah Mada melalui Sumpah Palapa terus hidup dalam Wawasan Nusantara, yang menjadi panduan dalam menjaga keutuhan wilayah dan keberagaman bangsa Indonesia.

PENUTUP

Konsep Nusantara yang diperkenalkan oleh Gajah Mada melalui Sumpah Palapa bukan hanya merupakan ambisi kekuasaan Majapahit, melainkan sebuah visi geopolitik yang jauh melampaui zamannya. Melalui politik ekspansinya, Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah-wilayah kepulauan yang kini dikenal sebagai Indonesia ke dalam satu struktur kekuasaan terkoordinasi. Pendekatan yang digunakan tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi diplomasi, integrasi budaya, dan pemahaman terhadap keberagaman sosial masyarakat Nusantara. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada menjadi embrio bagi terbentuknya kesadaran kolektif mengenai kesatuan wilayah yang hari ini dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep Nusantara yang ia rintis telah bertransformasi menjadi *Wawasan Nusantara* dalam geopolitik Indonesia modern, yang menjadi landasan kebijakan pertahanan, tata kelola wilayah, hingga semangat kebangsaan yang inklusif. Dengan kata lain, ekspansi Gajah Mada adalah fondasi awal dari konstruksi politik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bersatu dalam keberagaman. Kesatuan, stabilitas, dan identitas geopolitik Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari warisan historis Gajah Mada dan konsep Nusantara yang ia gaungkan. Sejarah mencatat bahwa strategi geopolitik Majapahit menjadi inspirasi kuat bagi para pendiri bangsa dalam membentuk negara yang majemuk namun tetap satu. Maka dari itu, memahami dan merefleksikan kembali konsep Nusantara Gajah Mada adalah langkah penting untuk memperkuat identitas dan daya tahan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global masa kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sri Wintala, (2016). 13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa. Yogyakarta: Araska.
- Coedes, George. (1968). *The Indianized States of Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma Putra, Anggara Putu, (2010). *Ajaran Kepemimpinan Dalam Kakawin Gajah Mada Perspektif Model Kepemimpinan Hindu Dalam Masyarakat Bali*.
- Munandar, Agus Aris. 2010. *Gajah Mada Biografi Politik*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Muljana, Slamet. 1965. *Menuju Puntjak Kemegahan (Sejarah Majapahit)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurhayati, Enung. 2017. *Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Narasi.
- Pigeaud, Th. G. Th. (1960). *Java in the 14th Century: A Study in Cultural History*. The Hague: Martinus Nijhoff
- Pinuluh, Esa Damar, (2010). *Pesona Majapahit*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Riana, I Ketut. 2009. *Kakawin Desa Warnnana Uthawi Nagara Krtagama Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Wolters, O. W. (1999). *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Yamin, Muhamad. 1993. *Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zoetmulder, P.J dan S.O. Robson. 2006. *Kamus Jawa Kuno-Indonesia. Vol I-II*, terjemahan Darusuprapto-Sumantri Suprayitno. Jakarta: Gramedia Pustka Utama